

291.432
Ang

† 9

**PENGARUH PERANAN WANITA DALAM KELUARGA
TERHADAP PENERIMAAN HARTA WARISAN DALAM
KEDUDUKANNYA SEBAGAI ANAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS)**



TESIS

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
MENCAPAI DERAJAT SARJANA S2
MAGISTER KENOTARIATAN**

OLEH

HENNY DWI BUDIASTUTY ANGGRAENI, SH

B4B001131

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

**PENGARUH PERANAN WANITA DALAM KELUARGA
TERHADAP PENERIMAAN HARTA WARISAN DALAM
KEDUDUKANNYA SEBAGAI ANAK MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS)**

OLEH

HENNY DWI BUDIASTUTY ANGGRAENI, SH

B4B001131

Telah disetujui oleh :

Tanggal : , 2003

Pembimbing Utama,

Ketua Program

Prof. H. ABDULLAH KELIB, SH
NIP. 130 354 857

Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP. 130 359 063

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2268 / T / mndt / 4
Tgl. : 12 Feb 2004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah pekerjaan saya sendiri didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan dilembaga pendidikan lainnya. pengetahuan yang diperoleh dan hasil penelitian maupun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2003



(Henny Dwi Budi Astuty Anggraeni, SH)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Teruntuk suami tercinta,

Ya ALLAH
 Dalam ketundukan dan kepasrahan kami memohon
 Dalam kecemasan dan ketidakberdayaan kami berharap
 Seandainya apa yang kami lakukan ini baik bagi agamamu
 Dunia dan akhirat kami, maka..
Jadikanlah pernikahan kami
 Sebagai awal langkah kami
 Untuk meniti jalan Mu yang lurus
 Dengan niat hati yang tulus
 Bahwa...
Pernikahan adalah sebagian dari
Sunnah Rosul Mu...
 Ya Robbi, kuatkanlah iman kami
 Untuk selalu mengingat Mu
 Serta jauhkanlah kami dari segala cobaan
 Ya Robbana, Engkaulah yang mengetahui
 Betapa hati kami menginginkan
 kekalnya ikatan ini
 Ya Rohim, Padukan cinta kami
 Hasilah dengan cahaya Robbani Mu
 yang tidak pernah pudar
 Ya Rohman, Jadikan lah rumah tangga kami
 penuh dengan kasih sayang
 dan taat kepada Mu..

Motto

Hiduplah untuk Allah dan untuk orang
 yang kita cintai.. jangan hidup untuk diri
 sendiri..

Tidak ada kata tidak bisa untuk sebuah
 kemauan..

Selamat bertugas Sayang...
 Doaku selalu menyertai dalam setiap langkahmu

ABSTRAK

Pengaruh Peranan wanita Dalam keluarga Terhadap Penerimaan Harta warisan Dalam kedudukannya Sebagai Anak Menurut Perspektif Hukum Islam.

(Studi di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)

Oleh :

Henny Dwi BudiAstuty Anggraeni, SH

Penerimaan harta warisan wanita dalam kedudukannya sebagai anak yang mewaris bersama anak laki-laki adalah 1:2. Hal ini karena perbedaan tanggung jawab dalam keluarga, seorang pria mempunyai tanggung jawab ekonomi sebagai kewajiban hukum, sedangkan wanita tidak mempunyai kewajiban untuk itu, namun wanita mempunyai hak dari suaminya (pria). Tapi suatu kenyataan menunjukkan bahwa wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja baik di dalam dan di luar rumah yang hasilnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh keluarga. Bahkan dalam kasus tertentu, wanita lah yang menanggung beban ekonomi keluarga, sedangkan pria mengurus jalannya keluarga.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana ide tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan diperoleh dari pengalaman, atau dapat dikatakan bahwa sesuatu dianggap benar bila dialaminya, dengan analisa data dilakukan secara kuantitatif dengan metode statistik. Untuk menguji ada atau tidak adanya pengaruh peranan wanita dalam keluarga terhadap penerimaan warisan antara pria dan wanita dipakai teori statistik berdasarkan rumus *korelasi product moment*.

Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa penerimaan harta warisan wanita tidak banyak dipengaruhi oleh keikutsertaan para wanita dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Ikut serta atau tidaknya para wanita bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tidak banyak pengaruhnya terhadap jumlah warisan yang diterimanya. Besar kecilnya bagian warisan yang diterima para wanita tidak banyak dipengaruhi oleh ikut serta atau tidaknya dalam membantu suami mencukupi kebutuhan ekonomi, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu : faktor jenis kelamin, faktor kelahiran, faktor kehidupan ekonomi, faktor hubungan personal antara pewaris dan ahli waris.

ABSTRACT

The Influence of Women Role In Family Toward the Acceptance of Inheritance in their Position as Daughter According to Islamic Law Perspective

(A Case Study In Ajibarang Subdistrict Banyumas Regency)

By:

Henny Dwi Budi Astuti Anggraeni, SH

The acceptance of inheritance for a woman in her position as a daughter compare to a son in a family is 1:2. This is because the difference of responsibility in a family, that a man has a legal obligation to guarantee the economic responsibility in a family, while a woman does not bear such responsibility as she has an economic right from her husband (man). But a fact shows that many women as wife work inside or outside home and do not use their salary for their own need but for their family needs. Even in some cases, women guarantee the economic responsibility of their family, and their husband handle household activities

This report applied method of juridical sociological approach. It is a method that the ideas of correctness that becomes the basic knowledge are derived from experiences. On the other words, something is considered valid if it's data analyzing is conducted qualitatively by using statistics method. To examine the existence of the women role influence toward the acceptance of inheritance between woman and man, the writer used statistical theory based on *product moment correlation formula*.

After conducting observation, it is found out that the acceptance of inheritance for women is not much influenced by the participation of women in the family's economic responsibility. The participation of women in helping their husband to fulfill the family's need by working inside or outside home is not much influence the number of inheritance women accepted. The number of inheritance is more influenced by some factors, which are: gender factor, birth factor, economic factor, interpersonal relationship between heir and inherit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia Nya, penulis berkesempatan untuk menyelesaikan tesis ini sesuai dengan harapan.

Diharapkan dengan materi tulisan ini merupakan kajian karya dari penelitian yang dilakukan selama perkuliahan mengikuti Program Studi Magister Kenotariatan (S2) pada Fakultas hokum Universitas Diponegoro di Semarang, yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dalam rangka menegakkan keadilan, khususnya masyarakat Indonesia.

Tesis yang merupakan prasyaraat untukl mencapai studi S2 ijni dapat terlaksana berkat dukungan, bantuan serta doronfgan berbagai pihak. Sehinngga pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati, Penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang memeberika kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akademik dengan menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : “ Pengaruh Peranan Wanita dalam Keluarga terhadap Penerimaan Harta Warisan dalam Kedudukannya sebagai Anak Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”

1. Bapak Prof. I G N. Sugangga, SH. Selaku ketua program kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak prof. H. Abdullah Kelib, SH. Selaku dosen pembimbinng yang telah meluangkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan Penulis hingga selesainya tesis ini.

3. Bapak R.Suharto,SH.Mhum,Selaku Sekertaris Program Magister Kenotariatan S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang juga sebagai penguji tesis.
4. Bapak Zubaidi,SH.Mhum selaku penguji tesis yang banyak membantu Penulis dalam memberikan masukan-masukan yang berarti dalam pengerjaan tesis ini.
5. Ibu Ro'fah Setyowati,SH.Mhum Selaku penguji tesis yang banyak membantu Penulis dalam memberikan saran,masukan yang berarti dalam mengerjakan tesis ini.
6. Bapak Suryono Sutarto,SH.Mhum Sebagai Dosen Wali.
7. Bapak Drs.Hirawan Danan Putra Selaku Camat Ajibarang beserta seluruh stafnya,yang telah membantu dalam mengumpulkan data dalam tesis ini.
8. Bapak dan Mama tersayang yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
9. Suamiku Tercinta Mas Sugeng Prihanto Utomo,SE yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam cinta dan kasihnya.
10. Kakakku tersayang Mba Ir.Diah, Mas Ir. Teguh, dan Adhekkku tersayang Dhe Ir.Iwan dan Gurit.
11. Masyarakat Ajibarang terutama yang telah bersedia menjadi Responden, sehingga memperlancar penyelesaian tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan di Erlangga Tengah 9.
13. Teman-teman Notariat Angkatan 2001.
14. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu proses pengerjaan tesis ini.

Akhirnya Penulis sadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan sehingga mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun, Penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Penulis

(Henny Dwi Budi Astuty Anggraeni, SH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Peranan Wanita menurut Hukum Islam	12
II. Kedudukan Wanita dalam Hukum warisan Islam	19
A. Wanita dan Asas - Asas Hukum Warisan Islam	19
B. Wanita dan Unsur – Unsur Kewarisan	24
C. Wanita dan Penggolongan Ahli Waris	25
D. Wanita dan Prinsip Keutamaan	33
E. Wanita dan Hak Masing – Masing Ahli Waris	35
F. Bagian Wanita dan Sifat Hukum Kewarisan Islam	42
III. Keluarga Dalam Islam	53
A. Perkawinan sebagai syarat pembentukan keluarga	53
B. Sistim kekerabatan dalam Islam	54
C. Fungsi keluarga	57
D. Suami istri dalam keluarga	58
E. Hubungan orang tua dengan anak wanita	60

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	63
2. Spesifikasi Penelitian	63
3. Populasi dan Sampling	63
4. Sumber Data	65
5. Analisa Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Struktur masyarakat Ajibarang	70
II. Peranan wanita dalam keluarga di Kecamatan Ajibarang	79
A. Praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Ajibarang.	87
B. Pemisahan harta pewaris dari harta bersama	92
C. Saat pembagian warisan	95
D. Cara – cara yang dilakukan dalam pembagian warisan	96
E. Ahli waris yang berhak dan bagian masing-masing.	99
III. Analisa pengaruh wanita dalam menanggung beban ekonomi keluarga terhadap warisan yang diterimanya.	110
IV. Faktor – faktor yang mempengaruhi besar kecilnya perolehan bagian warisan yang diterima oleh ahli waris anak perempuan di Kecamatan Ajibarang.	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap manusia dalam perjalanan hidupnya akan melewati suatu masa, dilahirkan, hidup di dunia dan meninggal dunia. Masa-masa tersebut tidak terlepas dari kedudukan kita sebagai makhluk Tuhan, karena dari Dia-lah kita berasal dan suatu saat kita akan kembali berada di pangkuanNya. Selain sebagai makhluk individu manusia juga berkedudukan sebagai makhluk sosial bagian dari suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Berbicara mengenai perjalanan hidup manusia, ketika manusia melewati masa-masa hidup di dunia, ia juga mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Ketika manusia itu meninggal dunia maka hak-hak dan kewajibannya akan berpindah kepada keturunannya, hal ini dapat diartikan adanya macam-macam hubungan hukum antara anggota masyarakat yang erat sifatnya¹, namun dengan adanya peristiwa mininggalnya seseorang tidak berakibat hilangnya perhubungan- perhubungan tadi, karena hukum telah mengatur bagaimana cara perhubungan itu dapat diselamatkan agar masyarakat selamat sesuai dengan tujuan dengan hukum yang

¹ Wirjono prodjodikoro. Hukum warisan di Indonesia (Bandung, Sumur Bandung 1993) halaman 18

mengaturnya dari kepentingan-kepentingan yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa itu. Membagi dan memperoleh bagian dari harta peninggalan seseorang karena kematian ini ketentuannya diatur dalam hukum waris².

Dari uraian tersebut, maka timbul apa yang dinamakan warisan³. Berbicara mengenai warisan maka menyangkut 3 unsur warisan yaitu :

1. Adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan.
2. Adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang akan mengalihkan atau meneruskan.
3. Adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembangian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan yang bukan ahli waris.

Menurut hukum Islam dalam surat An-nisa 11 mengatur perolehan ahli waris anak dalam 3 garis hukum, perolehan ahli waris ibu dan bapak dalam 3 garis hukum, mengenai perolehan anak sebagai ahli waris dengan pembagian sebagai berikut :

1. Apabila hanya satu anak perempuan maka memperoleh seperdua bagian.
2. Apabila ada 2 atau lebih anak perempuan, maka memperoleh dua pertiga bagian.

² R. Abdul Djamali, SH. Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum, Bandung, PT Mandar Maju, 2002, halaman 112

³ ibid halaman 19

3. Apabila anak perempuan mewaris bersama-sama anak laki-laki maka bagian warisan anak perempuan setengah bagian anak laki-laki⁴.

Norma hukum di dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 11 yang menentukan bagian ahli waris wanita setengah bagian pria, dilihat secara sepintas, memang norma hukum perolehan warisan wanita setengah bagian yang diterima pria sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif dan tidak adil. Tetapi kalau dikaji secara mendalam dan menyeluruh dalam satu sistim keluarga Islam, yaitu hukum waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan justru akan terlihat karena ketentuan perolehan warisan wanita setengah bagian pria tersebut dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukan kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Ini dijelaskan di dalam Q.S, 4 : 34 yang terjemahannya (kurang lebih) sebagai berikut :

“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk membiayai kehidupan keluarganya)”⁵

⁴ A. Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesiam, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 1999, halaman 259.

⁵ Al-Qur'an dan terjemahannya, (Semarang, Asy-Syifa, 1998)

Sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an tersebut dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hmzah Aszaqasi disebutkan (artinya) sebagai berikut :

“Dan diwajibkan kepada kamu (pria) untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka (wanita) secara baik”⁶

Oleh karena kemampuan seseorang dalam memberi nafkah tidak sama, maka didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (pasal 34 ayat 1)

Keperluann hidup berumah tangga tersebut oleh kompilasi hukum Islam disebutkan secara agak rinci yaitu meliputi :

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak (pasal 80 ayat 4)

Demikianlah, menurut hukum Islam seluruh beban ekonomi keluarga diletakan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum. Kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Namun pembebasan ini hanya berlaku terhadap diri istri sendiri dan tidak dapat berlaku bagi anak-anaknya. Demikian kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat (6) menjelaskan.

⁶ Miqdad Yaljan, Potret Rumah Tangga Islamy (Al-Baitul Islamy), Terjemahan SA zemol, Solo, Pustaka Mantiq, halaman 101

Sedangkan wanita hanya berkewajiban mengatur untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Hal ini ditegaskan di dalam Hadist, bahwa Rasulullah bersabda kepada Hind, istri Abi Sufyan yang terjemahannya (kurang lebih) sebagai berikut :

“Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara baik”⁷

Kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga ini juga di tegaskan di dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (2) dan kompilasi hukum Islam pasal 83 ayat (2). Dinyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

Oleh karena ketentuan di dalam hukum perkawinan itu harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga sebagai satu sistem. Maka norma hukum kewarisan Islam yang menentukan bagian warisan wanita setengah bagian pria, merupakan ketentuan yang adil, sesuai hak dan kewajibannya yang diberikan oleh hukum.

Apabila seorang wanita mendapat bagian warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka bagian warisan yang diperolehnya itu menjadi hak milik pribadinya sendiri. Bagian warisan yang diterimanya tersebut tidak boleh digunakan untuk keperluan keluarganya, kecuali kalau memang direlakannya, Wanita tersebut dapat menyimpan atau menabung untuk dirinya sendiri, atau membelanjakan untuk kepentingan pribadi, sementara pada waktu yang sama wanita mempunyai hak atas keperluan hidup dari suaminya.

⁷ ibid, halaman 102

Sementara seorang pria yang menerima bagian warisan dari orang tuanya yang telah meninggal, walaupun bagian warisannya dua kali lipat bagian wanita, tetapi bagian warisan itu adalah untuk keperluan seluruh anggota keluarganya.

Dengan demikian perbedaan jumlah perolehan warisan antara pria dan wanita tersebut disebabkan karena perbedaan tanggung jawab di dalam keluarga. Pria membutuhkan materi yang lebih banyak dari wanita, karena pria memikul kewajiban ekonomi secara ganda untuk istri beserta anak-anaknya. Perolehan bagian warisan yang disesuaikan dengan kewajiban dan tanggung jawab inilah yang merupakan keadilan, sebab pria akan merasakan manfaat yang sama dengan manfaat yang dirasakan wanita atas perolehan warisan yang diterimanya walaupun secara nominal berbeda.⁸

Dihubungkan dengan masalah ini bahwa hukum Islam tidak dapat dipandang dari satu segi saja secara terpisah, tetapi harus dilihat dari satu sistem Islam secara keseluruhan. Apabila suatu unit tidak berjalan maka akan mempengaruhi unit lain, karena masing-masing unit saling menopang untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia, yang hendak dicapai oleh sistem hukum Islam secara keseluruhan.

Yang menjadi masalah adalah apabila dalam suatu sistem unit-unit yang ada tidak bekerja menurut fungsinya. Gejala ini nampak di dalam kehidupan keluarga muslim. Menurut sistem hukum kekeluargaan Islam yang secara positif berlaku baginya, beban dan tanggung jawab ekonomi di dalam keluarga dipikul oleh kaum

⁸ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan adat minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984) halaman 24

pria saja, sebagai suatu kewajiban hukum. Sedangkan wanita tidak mempunyai kewajiban untuk itu. Bahkan sebaliknya, wanita mempunyai hak dari suaminya. Tetapi gejala sosial ini tidak selalu demikian. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa para wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampilkan dirinya di dalam masyarakat di Indonesia. Para wanita banyak mempunyai peranan dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Para wanita tidak hanya bekerja sebagai Ibu rumah tangga semata-mata, yang hanya disibukan dengan urusan mengatur jalannya kehidupan keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.

Demikian juga yang terjadi di Ajibarang, Kabupaten Banyumas, berdasarkan data perekonomian masyarakat di Ajibarang, Kabupaten Banyumas, diperoleh data yang menunjukkan bahwa wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja diluar rumah baik sebagai karyawan perusahaan, pegawaiai negeri, pedagang maupun buruh. Semua ini menunjukkan adanya aktivitas wanita dalam keikutsertaannya menanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan demikian beban ekonomi keluarga tidak hanya di pikul oleh pria saja seperti yang diwajibkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi wanita juga ikut menanggungnya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, wanitalah yang menanggung

beban ekonomi keluarga, sedangkan pria mengurus jalannya kehidupan keluarga dirumah.

Melalui pendekatan analisis sistim, berdasarkan bekerjanya masing-masing unit yang saling terkait dalam suatu sistim itu, maka kalau hanya logika saja yang dipergunakan, gejala bekerjanya wanita untuk ikut menanggung beban ekonomi keluarga, akan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang adanya beban ekonomi keluarga di pikul oleh wanita, sehingga ada kemungkinan pengaruhnya terhadap porsi penerimaan warisan antara pria dan wanita.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan agar penelitian ini lebih terarah serta dapat tercapai sasaran yang diharapkan, maka akan dikemukakan permasalahan yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan wanita di dalam keluarga di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana pengaruh wanita yang ikut menanggung beban ekonomi keluarga terhadap penerimaan harta warisan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti. Hal ini sebagai pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peranan wanita dalam keluarga di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh peranan wanita didalam keluarga terhadap porsi penerimaan warisan.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat

1. Memberikan sumbangan secara teoritis bagi :
 - a. Ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum kewarisan Islam yang menentukan bagian warisan wanita setengah bagian pria di tengah-tengah emansipasi wanita di dalam masyarakat.
 - b. Pembentuk Undang-undang dalam menentukan bagian warisan bagi masyarakat muslim ditengah-tengah peranan wanita yang terus mengalami perkembangan.
 - c. Para ilmuwan maupun para peneliti di dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para Ulama, hakim pengadilan agama, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus kewarisan.

E. SISTIMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, dimana tiap-tiap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa sub-sub bab. **Bab Pendahuluan** : yang akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah untuk mengarahkan isi agar jelas, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dari aspek keilmuan dan praktis serta sistematika penelitian. **Bab Tinjauan Pustaka**, menguraikan tentang peranan wanita menurut hukum Islam, kedudukan wanita dalam hukum kewarisan Islam yaitu tentang wanita dan asas-asas hukum kewarisan Islam, wanita dan unsur-unsur kewarisan, wanita dan penggolongan ahli waris, wanita dan prinsip keutamaan, wanita dan hak masing-masing ahli waris, bagian wanita dan sifat hukum kewarisan Islam, serta menguraikan tentang keluarga dalam Islam yaitu tentang perkawinan sebagai syarat pembentukan keluarga. Sistim kekerabatan dalam Islam, fungsi keluarga, suami istri dalam keluarga, hubungan orang tua dengan anak. **Bab Metodologi Penelitian**, akan dibahas mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian sumber-sumber data serta analisa data. **Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan**, akan dibahas mengenai struktur masyarakat

Ajibarang, praktek pembagian warisan di Kecamatan Ajibarang, peranan wanita dalam keluarga di Kecamatan Ajibarang. Analisis pengaruh peranan wanita dalam keluarga terhadap porsi penerimaan harta warisan. **Bab Penutup** yang berisi kesimpulan dari uraian sebelumnya serta saran-saran yang di anggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. PERANAN WANITA MENURUT HUKUM ISLAM

Tugas alami untuk pekerjaan wanita adalah mengurus rumah tangga, menjadi seorang istri, menjadi ibu dari anak-anaknya, serta menjadi pendidik, pengatur dan pemelihara rumah tangga. Wanita adalah pemimpin rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan tugas seorang wanita. Diantaranya adalah firman Allah, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahnya (Al-Ahzab:33) yang menjelaskan bahwa tempat tinggal utama wanita adalah rumah tangga dan pengecualiannya adalah tempat di luar rumah. Akan tetapi, bagaimanapun, pengecualian tidak dapat diubah menjadi yang utama. Ayat tersebut tidak menafsirkan bahwa wanita akan terpenjara di dalam rumahnya karena pada ayat selanjutnya terdapat petunjuk sebagai berikut.

"..... Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu (A-Ahzab:33)

Ayat tersebut memberikan pemahaman tentang bolehnya wanita ke luar rumah. Yang dilarang Islam adalah berhias dan bertingkah laku di luar rumah selain untuk suami bukan berhias dan bertingkah laku untuk suami di dalam rumah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wanita boleh ke luar rumah

asalkan keluarnya itu bukan untuk berhias dan bertingkah laku untuk selain suami.

Untuk memperkuat masalah di atas, Allah menegaskan bahwa kekhususan wanita adalah diam diam di rumah, seperti dalam firman-Nya ini.

.....janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar (Ath-Thalaq:1)

Ayat di atas menunjukkan bahwa rumah adalah sesuatu yang dihubungkan kepada wanita karena rumah adalah kerjaan dan tempat tinggal wanita. Dalam masalah ini Rasulullah mengisyaratkan bahwa tanggung jawab wanita itu ada di dalam rumah tangganya.

“wanita adalah pemimpin rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (Muttafaq ‘Alaih)

Sabda Rasulullah itu telah beliau aplikasikan dalam rumah tangga Fatimah dan Ali r.a. itu dapat dilihat ketika beliau menikahkan putrinya, Fatimah, kepada Ali r.a. Rasulullah saw memerintahkan putrinya, Fathimah, untuk mengurus masalah-masalah rumah tangga dan memerintahkan Ali r.a. bekerja diluar rumah.

Di dalam hadits sahih yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah saw. Bersabda, “..... wanita adalah pemimpin rumah tangga suami dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. Hadits tersebut membuktikan bahwa rumah tangga adalah kerajaan wanita yang wajib diatur olehnya dengan cara membersihkannya serta menyediakan makanan dan

minuman bagi suami dan anak-anaknya, sehingga apabila suami tiba di rumah, dia dapat merasakan ketenangan dan ketentraman.

Peranan yang perlu diperhatikan oleh istri selaku ibu rumah tangga adalah

- a. Menciptakan suasana yang tenang dan damai didalam rumah tangga bagi suaminya agar suami dapat melaksanakan tanggung jawabnya di luar rumah bekerja dan berusaha mencari nafkah yang halal Allah SWT, berfirman:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang” (Al- A’raaf:189)

Kewajiban istri selain taat kepada suami, adalah berhias dan mempercantik diri untuk kepentingan suami sehingga suami merasa gembira serta tidak mengajaknya untuk tidak melakukan dosa. Istri harus dapat memelihara dan menjaga rumah baik ketika suami bepergian maupun ketika berada di rumah sebab istri adalah penjaga harta suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas pemeliharaannya. Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak seorang mu’min memohon sesuatu yang bermanfaat baginya setelah taqwa itu lebih baik dari pada istri yang saleh, yaitu istri yang taat ketika diperintahkan, menyenangkan ketika dipandang berbuat baik ketika bersumpah, serta dapat menjaga diri dan memelihara harta ketika suami tidak ada dirumah”. (Hadits Ahmad)

Oleh karena itu keluarnya wanita dari rumah untuk kerja, tanpa adanya kepentingan, dianggap sebagai sesuatu yang dapat mengurangi hak berumah

tangga dan hak suami. Sesungguhnya Allah telah menciptakan wanita hanya untuk menjadi istri bagi suaminya yang diantara keduanya diikat oleh tali penghubung berdasarkan rasa kasih sayang. Firman Allah, “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Arrum :21) oleh karena itu seseorang istri dituntut agar dapat melayani suaminya, menggaulinya dengan baik dan menaatinya kecuali dalam perbuatan maksiat, bahkan ketika diajak untuk berjimak sekalipun. Diriwayatkan dari Abuhurairah bahwa Rasulullah bersabda : “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kamar, lalu istrinya menolak maka istri akan dilaknat para malaikat hingga pagi hari. (HR. Bukhari)

Sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa dibalik semua kebesaran seorang laki-laki ada seorang wanita. Dari segi ekonomi, dapat dikatakan bahwa terlaksananya tugas istri didalam menciptakan suasana rumah tangga yang baik membantu suami melipat gandakan pendapatannya. Bagaimanapun, jika suami harus terjun mengatur urusan rumah tangga, pekerjaannya diluar rumah akan terbengkalai.

- b. Memberikan keturunan sesuai dengan firman Allah “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal

yang baik) untuk dirimu” (Al-Baqarah 223). Ayat di atas menegaskan bahwa diantara tugas wanita dalam rumah tangga adalah memberikan keturunan yang banyak agar dapat memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah. Dengan mengkaji sejarah para Sahabat dan Tabi’in akan kita temukan bahwa yang telah mendidik Umar bin Abdul Aziz sehingga menjadi seorang Khalifah yang terkenal adalah seorang ibu, putri seorang penjual susu. Hal serupapun akan kita temukan jika kita mengkaji riwayat Khalifah ke-dua, Umar bin Khatab RA.

c. Menyusui Anak Seusia Dengan Firman Allah:

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya.....”
(Al-Baqarah 233)

Perintah menyusui anaknya ini pada asalnya untuk ibu, tetapi berdasarkan petunjuk-petunjuk seorang dokter, seorang ibu dapat juga mewakilkan penyusuan anaknya kepada wanita lain. Akan tetapi dalam mewakilkan kepada wanita lain kita tidak akan menemukan manfaat-manfaat penyusuan, seperti adanya perasaan kasih sayang dan kerinduan. Jika seorang ibu merasa sulit untuk menyusui anaknya, ibu tidak boleh memaksa suaminya agar mengupah wanita lain untuk menyusukan anaknya. Hal itu akan lebih jelas jika kita lihat dalam firman Allah berikut ini. ”..... dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Ath-Talaq: 6)

Jika suami itu seorang kafir, tidak mampu membayar upah susuan atau anak tidak menerima susuan selain dari ibunya, ibu harus menyusukan anaknya sendiri. Keluarnya ibu untuk bekerja tanpa adanya kepentingan syar'a tidak boleh menyebabkan bahaya bagi anaknya seperti bimbingan rohani anaknya terabaikan atau hilangnya kasih sayang ibu terhadap anaknya.

- d. Pearanan wanita tidak terbatas hanya memberikan keturunan dan menyusui anak, tetapi juga harus dapat mendidik anaknya. seorang anak lebih banyak membutuhkan kehadiran dan peran ibu setelah dia melampaui masa penyusuan dan penyapihan. Hal itu sangat penting dalam usahanya untuk dapat hidup mandiri, misalnya ketika makan, minum, bicara, dan lain-lain. Ibu harus dapat menanamkan kebiasaannya dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam kepada anaknya. Didalam menafsirkan firman Allah mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. ...Al-Ahgaaf:15 sebagian ulama' tafsir mengatakan bahwa masa tiga puluh bulan itu mencakup masa kehamilan (biasanya selama sembilan bulan), masa menyusui dua tahun, dan masa menyapih. Rasulullah SAW bersabda :

“Sebaik-baik wanita yang dapat mengendarai unta adalah wanita saleh dari suku Quraish, sebab mereka dapat dipercaya didalam mendidik anaknya dan memelihara kebutuhan suaminya.”

- e. Mengatur rumah tangga sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan kasih sayang bagi suami dan anak-anak. Yang dimaksud kemampuan mengatur

disini adalah kemampuan istri dalam memperkirakan pengeluaran rumah tangga secara rinci yang dalam istilah perekonomian dinamakan rencana pengeluaran belanja. Selain itu seorang istri harus dapat menyesuaikan neraca perkiraan dengan neraca pelaksanaan. istri yang bijaksana mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran serta antara tuntutan rumah tangga, tuntutan suami serta anak-anaknya, tanpa mengabaikan kebutuhan lain. Seorang istri harus mampu merubah rumahnya menjadi apotek hidup. Dan warung hidup sehingga segala keperluan yang berhubungan dengan pengobatan dan rempah rempah tidak harus dengan jalan membelinya. Hal itu tentunya akan menghemat uang belanja, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

“Apabila seorang istri menafkahkan makanan rumah tangga bukan hasil maksiat, maka dia mendapat pahala atas apa yang dia nafkahkan dan suami mendapatkan pahala atas apa yang di usahakan, demikian pula pahala bagi pembantu rumah tangga dengan tidak dikurangi sedikitpun”. (Muttafaq ‘Alaih)

Seorang istri yang baik harus menerima rezeki yang Allah berikan kepadanya dan dia tidak mengeluh ketika mendapatkannya rezeki yang menurutnya tidak mencukupi sebaiknya dia meneladani kehidupan rumah tangga Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah ra.

“Keluarga Muhammad belum pernah kenyang selama dua hari berturut-turut dari memakan roti atau gandum hingga akhir hayatnya.” (Mutafaq Alaih)

Di sisi lain, Aisyah pernah berkata kepada Urwah bin Zubair.

“Wahai keponakanku, demi Allah, selalu menunggu awal bulan hingga awal bulan yang lain tiga kali dalam dua bulan selama itu tidak ada api menyala dalam rumah tangga Rasulullah”. Urwah bertanya, “Wahai bibi, makanan apa yang ada dalam rumah tangga itu?” Aisyah menjawab, “kurma dan air.”

“Tidaklah seseorang manusia memenuhi wadah itu lebih jelek dari pada memenuhi isi perutnya. Cukuplah baginya beberapa suapan yang dapat menguatkan tulang iganya. Jika dia melakukan hal itu karena keinginan, maka hendaknya sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga yang lain untuk pernafasannya”. (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)

II. KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Wanita dan Asas-asas Hukum Warisan Islam

Dengan berpedoman kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang mengatur masalah kewarisan dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan Islam berdasarkan asas ijbari, Individual, bilateral, pemerataan, keadilan dan prinsip kewarisan hanya karena kematian.

1. Asas Ijbari

Yang di maksud dengan prinsip ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Dalam hukum kewarisan Islam dijalankan prinsip Ijbari ini berarti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris⁹.

⁹ Amir Sayafriuddin, Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau (Jakarta Gunung Agung 1984) hal 18

Ditegaskan prinsip Ijbari dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris, andai kata pewaris mempunyai hutang lebih besar dari pada warisan yang ditinggalkannya ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris berapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan di dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan tidak dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayarannya itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik¹⁰.

2. Asas Individual

Secara singkat dapat di katakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ketentuan mengenai prinsip individual ini dalam hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 7. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang laki-laki atau perempuan berhak menerima warisan dari orang tua maupun kerabat dekatnya.

¹⁰ A. Rahmat budiono SH. MH. Pembaharuan hukum kewarisan di indonesia (bandung PT CITRA ADITYA BAKTI 1999) hal 23

Pengertian berhak atas warisan tidak berarti bahwa warisan itu tidak harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan tidak dibagi-bagikan asal hal ini dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan atau keadaan menghendakinya, misalnya seorang suami meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang masih kanak-kanak. Apa pun alasannya dalam keadaan seperti ini keadaan menghendaki warisan tidak dibagi-bagikan. Tidak dibaginya warisan ini demi kebaikan para ahli waris itu sendiri yang lebih penting tidak dibagi-bagikannya warisan itu tidak menghapuskan hak mewarisi para ahli waris yang bersangkutan.

3. Asas Kewarisan hanya karena kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang pada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia.

Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup, segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak, tidak termasuk kedalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan “yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam KUH Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

4. Asas Bilateral

Yang dimaksud asas bilateral dalam hukum kewarisan adalah asas yang memberikan persamaan hak antara pria dan wanita untuk menerima harta warisan yang ditinggalkan pewaris baik pewaris tersebut pria maupun wanita, ini berarti bahwa seseorang ahli waris baik pria maupun wanita berhak atas harta warisan dari kedua belah pihak garis kerabat baik dari garis keturunan pria maupun wanita hal ini ditegaskan oleh Allah didalam Q.S.4 : 7 yang terjemahannya (kurang lebih) sebagai berikut:

“Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit maupun banyak menurut pembagian yang ditetapkan¹¹.”

5. Asas Keadilan

Esensi keadilan adalah pertimbangan tanggung jawaban baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban bertolak dari itu, maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban begitu juga keseimbangan antara keperluan dan kegunaan.

Tercermin dalam Q.S.4 : 11 yaitu bagi anak wanita setengah bagian warisan anak pria, secara sepintas ketentuan ini akan menimbulkan kesan adanya rasio hukum yang tidak adil. Akan tetapi jika diteliti maka akan nampak keadilan yaitu keadilan yang menetapkan segala sesuatu pada

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang, Asy-Syifa 1998

tempatny sesuai dengan tanggung jawab pria sebagai suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

6. Asas Pemerataan

Hukum waris Islam mempunyai asas pemerataan, artinya hukum waris Islam cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris. Harta waris yang di tinggalkan pewaris dibagi kepada ahli waris secara merata dengan berpedoman kepada hubungan perkawinan dan hubungan darah yang paling dekat. Asas pemerataan ini dapat dilihat dari Q.S.4 : 11 .12 dan 176 dari ketiga ayat yang mengatur bagian masing-masing ahli waris secara rinci ini dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa sistem keutamaan para ahli waris yang di tentukan di dalam al-Quran adalah berbeda dengan yang lain. Perbedaanya terletak pada adanya kesempatan para ahli waris secara bersama-sama mewaris harta warisan pewaris. Misalnya ayah ibu dapat mewaris bersama-sama dengan anak dan suami atau isteri pewaris, ayah, ibu dapat mewaris bersama-sama dengan saudara dan suami atau istri pewaris dan sebagainya

Bahkan di dalam QS.4 : 8 dinyatakan bahwa yang artinya sebagai berikut :

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”¹²

¹² Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang, As-syifa 1998

B. Wanita dan unsur-unsur kewarisan

Dengan meninggalkannya seseorang maka menentukan saat terbukanya warisan, maka proses kewarisan pada perinsipnya berkisar pada persoalan pewaris yang meninggalkan harta kepada ahli warisnya dalam hal ini wanita menjadi ahli waris yang mempunyai hak-hak yang sudah ditentukan. Oleh karena itu adanya pewaris harta warisan dan ahli waris merupakan pembentuk kewarisan.

Rukun kewarisan ada 3 yaitu ¹³:

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini dalam kepustakaan sering pula disebut mewarrits.

b. Ahli Waris

Yang dimaksud dengan ahliwaris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

¹³ A. Rahmad Budiono SH.MH, Pembaharuan Hukum Kewarisan di Indonesia (Bandung, PT Cakra Aditya Bakti, 1999) halaman 9

c. Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam kepustakaan istilah warisan tersebut sering pula disebut *mauruts*, *tirkah*.

C. Wanita dan Penggolongan Ahli Waris

Hukum kewarisan yang dikehendaki oleh Al-Qur'an adalah berasaskan bilateral¹⁴. Berdasarkan asas ini maka hukum kewarisan Islam tanpa membedakan pria dan wanita sebagai sesama ahli waris penggolongan ahliwaris dibagi menjadi 2

1. Ditinjau dari jenis kelaminnya

Jika ditinjau dari segi kelaminnya maka ahli waris dapat dibagi menjadi dua macam bagian yakni :

1.1 Ahli waris pria yang kesemuanya berjumlah 15 (lima belas) golongan yakni::

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki)
- c. Bapak
- d. Kakek dari bapak dan seterusnya ke atas

¹⁴ Dra. Hasmiah Hasan, Hukum Warisan Dalam Islam (Surabaya, PT Bina Ilmu 1987) halaman 11-17

- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki sebapak
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- i. Anak laki-laki dari saudara sebapak.
- j. Paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung)
- k. Paman (saudara laki-laki bapak yang sebapak)
- l. Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan ayah.
- m. Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah.
- n. Suami.
- o. Seorang laki-laki yang memerdekakan budak.

Apabila ahli waris tersebut diatas seluruhnya ada, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya tiga saja yaitu :

- a. Anak laki-laki.
- b. Suami.
- c. Bapak.

1.2 Ahli waris wanita yang kesemuanya berjumlah 10 golongan yakni:

- a. Anak perempuan.
- b. Cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki)
- c. Ibu.
- d. Nenek (ibu dari bapak).
- e. Nenek (ibu dari ibu dan seterusnya ke atas)

- f. Saudara perempuan sekandung.
- g. Saudara perempuan yang seapak.
- h. Saudara perempuan yang seibu.
- i. Istri.
- j. Seorang perempuan yang memerdekakan budak.

Apabila ahli waris tersebut diatas seluruhnya ada, maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya lima (5) saja yakni :

- a. Istri.
- b. Anak perempuan.
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- d. Ibu.
- e. Saudara perempuan sekandung.

Apabila semua ahliwaris yang tersebut di atas semua ada baik laki-laki maupun perempuan, maka yang berhak memperoleh dari harta peninggalan hanya ada lima saja yakni :

- a. Suami atau istri.
- b. Ibu.
- c. Bapak.
- d. Anak laki-laki.
- e. Anak perempuan.

2. Ditinjau dari hak dan bagianya.

Ahliwaris tersebut di atas yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) golongan, jika ditinjau dari jumlah bagianya maka terbagi lagi kepada tiga bagian yakni DZAWIL FURUDL, DZAWIL ASHABAH, dan DZAWIL ARHAM.

2.1 Ahli waris dzul faraid

Yang dimaksud dengan ahli waris dzul faraid ialah ahli waris yang mendapat bagian menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. "Yang dimaksud tertentu ialah tententunya jumlah yan mereka terima yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, dua pertiga, seperdelapan, sepertiga dan seperenam.¹⁵ Semua bilangan ini disebutkan oleh Al-Qur'an untuk ahli waris tertentu.

Mereka yang termasuk ahli waris dzul faraid ialah delapan orang dari golongan perempuan yaitu :

- a. Istri.
- b. Ibu.
- c. Nenek.
- d. Anak perempuan.
- e. Cucu perempuan dan anak laki-laki.
- f. Saudara perempuan sekandung.
- g. Saudara perempuan seapak.

¹⁵ Ali Hasan, Hukum Waris Dalam Islam (Jakarta, Bulan Bintang, 1981), Halaman 17

h. Saudara perempuan seibu.

Dan ada empat orang dari golongan laki-laki yaitu :

- a. Suami.
- b. Ayak atau bapak.
- c. Kakek.
- d. Saudara laki-laki seibu (anaknya ibu).

2.2 Ahli Waris Asabah

Yang dimaksud dengan ahli waris asabah adalah:

“Ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dzul faraid. Dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzul faraid, atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris dzul faraid¹⁶.

Penamaan asabah itu semula berasal dari kata usbah, yaitu pengertian dalam sistem hubungan darah¹⁷. Kemudian ditarik ke pengertian kewarisan, sesuai dengan kedudukannya dalam hubungan darah, usbah artinya sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal¹⁸.

¹⁶ Hasniah Hasan, op cit halaman 15

¹⁷ Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta UI Pres 1982), Halaman 100

¹⁸ ibid

Ahli waris asabah dibagi menjadi tiga, yaitu asabah binafsihi, asabah bilghairi dan asabah ma'al ghairi.

a. Ashabah Binnafsi

Yakni ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya, bukan karena bersama ahli waris yang lain.

Mereka berjumlah 12 orang yakni :

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- 3) Bapak dengan demikian bapak memperoleh furudl dan juga memperoleh asabah.
- 4) Kakaek (sama dengan bapak)
- 5) Saudara laki-laki sekandung.
- 6) Saudara laki-laki sebak.
- 7) Anak saudara laki-laki yang sekandung.
- 8) Anak saudara laki-laki yang sebak.
- 9) Paman (saudara bapak yang sekandung).
- 10) Paman (saudara bapak yang sebak)
- 11) Anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak.
- 12) Anak laki-laki dari paman yang sebak dengan bapak.

Apabila ahliwaris tersebut semuanya ada, maka tidak seluruhnya memperoleh bagian tetapi harus didahulukan yang lebih dekat pertalian keluarganya dengan yang meninggal.

- b. Asabah bil-ghairi adalah ahli waris asabah karena bersama ahli waris lainnya. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan asabah bil-ghairi adalah “seorang wanita yang menjadi asabah karena ditarik oleh orang laki-laki”. Yang dimaksud asabah ini adalah¹⁹:
- a) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki.
 - b) Cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki, dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki.
 - c) Saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung, dan
 - d) Saudara perempuan seapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki seapak.
- c. Asabah ma'al-ghairi saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi asabah karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Yang termasuk asabah ma'al-ghairi adalah:
- a) Saudara perempuan kandung yang mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - b) Saudara perempuan seapak yang mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

¹⁹ Ibid, halaman 70

Jika ketiga jenis asabah tersebut diteliti, akan jelas kelihatan bahwa hanya orang laki-laki atau orang perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi asabah. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu misalnya, jelas bukan merupakan ahli waris asabah. Bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut ajaran kewarisan patrilineal hanya dipandang sebagai ahli waris dzul arham.

3. Ahli waris dzul arham

Yang dimaksud ahli waris dzul arham adalah ahliwaris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Profesor Hazairin menyebut ahli waris dzul arham ini sebagai anggota keluargan menantu laki-laki²⁰. Profesor Mahmud Yunus menyebutkan bahwa ahli waris dzul arham adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi hubungan itu telah jauh²¹.

Yang dimaksud ahli waris dzul arham misalnya

- a) Anak dari cucu perempuan (laki-laki atau perempuan), disamakan kedudukannya dengan cucu perempuan.

²⁰ Hazairin, op-Cit halaman 77

²¹ Mahmud Yunus, Hukum Warisan Dalam Islam (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1974), halaman 60

- b) Cucu dari anak perempuan, disamakan kedudukanya dengan anak perempuan.
- c) Kakek (bapaknya ibu) disamakan kedudukanya dengan ibu.
- d) Nenek (ibunya ibu) disamakan kedudukanya dengan ibu.
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, sebapak, atau seibu) disamakan kedudukanya dengan saudara laki-laki.
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, disamakan keduanya dengan saudara laki-laki seibu.
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan (sekandung, sebapak, atau seibu) disamakan kedudukannya dengan saudara perempuan.
- h) Bibi (saudara perempuan bapak) disamakan kedudukanya dengan bapak.
- i) Paman (saudara bapak yang seibu) disamakan kedudukanya dengan bapak.
- j) Saudara ibu (laki-laki atau perempuan) kedudukanya sama dengan ibu.

D. Wanita dan Prinsip Keutamaan

Prinsip keutamaan adalah prinsip yang menentukan keikutsertan para ahli waris dalam golongan untuk mewaris dalam arti golongan yang satu lebih di utamakan dari golongan yang lain²². Prinsip keutamaan ini tidak didasarkan atas perbedaan jenis kelamin pria atau wanita, tetapi semata-mata di dasarkan pada

²² Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits (Jakarta, Tinta Emas, 1982), halaman 32

hubungan darah yang lebih dekat antara ahli waris yang satu dengan yang lain.

Hal ini berdasarkan Q.S. 8 : 75 yang terjemahnya (kurang lebih) sebagai berikut :

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagian lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat)”²³.

Hazairin mengelompokan ahli waris ke dalam golongan-golongan berdasarkan prinsip keutamaan sebagai berikut.

1. Kelompok keutamaan pertama terdiri dari :
 - a. Anak-anak, baik pria maupun wanita beserta ahli waris penggantinya dari anak-anak tersebut.
 - b. Ayah dan Ibu
 - c. Suami atau Istri
2. Kelompok keutamaan ke dua terdiri dari :
 - a. Saudara baik pria maupun wanita beserta ahli waris penggantinya baik pria maupun wanita
 - b. Ayah dan Ibu
 - c. Suami atau Istri
3. Kelompok keutamaan ketiga terdiri atas dari :
 - a. Ayah dan Ibu
 - b. Suami atau istri

²³ Al-Qur'an dan terjemahannya (Semarang, Asy-Yira, 1998)

4. Kelompok keutamaan keempat terdiri dari:

- a. Suami dan istri.
- b. Ahli waris dari ayah dan Ibu

Kelompok-kelompok keutamaan tersebut berlaku secara tertib artinya ahli waris dalam kelompok keutamaan pertama merupakan kelompok yang utama.

Ahli waris yang berada dalam kelompok keutamaan kedua baru mempunyai hak mewaris jika ahli waris yang berada dalam kelompok keutamaan pertama tidak ada.

E. Wanita dan Hak Masing-masing Ahli Waris

Walaupun Q.S. 4 : 11,12 dan 176 telah menjelaskan secara rinci tentang ahli waris dan bagiannya masing-masing, tetapi oleh karena bagian tersebut berubah-ubah sesuai dengan keberadaan ahli waris yang lain, yang bersama-sama mewaris maka untuk jelasnya akan di uraikan sebagai berikut²⁴ :

1. Suami

QS. An Nisaa (4):12 menentukan bagian suami menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Satu seperempat ($\frac{1}{4}$) harta warisan jika mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud dengan anak di sini termasuk

²⁴ Kyai Ahmad Azhar Basyir, Ma. Hukum Waris Islam (Yogyakarta, UII Pres, 2001), halaman 43-61

cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki anak atau cucu itu diperoleh baik dari suami yang dahulu maupun dari suami yang ditinggalkan itu.

- b. Setengah ($1/2$) harta warisan apabila tidak ada anak seperti tersebut di atas.

2. Istri

QS An Nisaa (4):12 menentukan bagian istri menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Satu perdelapan ($1/8$) harta warisan apabila mayit (pewaris) meninggalkan anak yang berhak waris. Yang dimaksud anak termasuk juga cucu (dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki. Anak atau cucu diperoleh baik dari istri yang ditinggalkan maupun dari istri yang terdahulu.
- b. Satu perempat ($1/4$) harta warisan bila tidak ada anak atau cucu seperti tersebut di atas.

3. Ayah

QS An Nisaa (4): 11 menentukan bagian ayah menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila bersama-sama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
- b. Menjadi 'ashabah apabila tidak ada anak atau cucu.

- c. Satu perenam ($1/6$) harta warisan dan 'ashabah apabila bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

4. Ibu

QS An Nisaa (4):11 menentukan bagian ibu menjadi dua macam yaitu:

- a. Satu perenam ($1/6$) harta warisan apabila ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara.
- b. Satu pertiga ($1/3$) harta warisan apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara seperti tersebut di atas.
- c. Satu pertiga ($1/3$) sisa setelah diambil bagian suami atau istri apabila bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri.

5. Anak Perempuan

Q.S. 4 :11 Menentukan bahwa anak wanita yang mewarisi tidak bersama pihak pria mempunyai tiga kemungkinan mewaris.

- a. jika anak wanita hanya seorang dan tidak ada anak pria maka bagianya $1/2$ harta warisan
- b. jika anak wanita dua orang atau lebih dan tidak ada anak pria maka bagianya $2/3$ harta warisan.

- c. jika anak wanita berapapun jumlahnya mewaris bersama anak pria berapapun jumlahnya, maka di bukan sebagai dzul faraidh Artinya bagianya tidak tentu. Yaitu bagian sisa dari harta yang telah di bagikan kepada dzul faraidh, dengan ketentuan bagian wanita setengah dari bagian pria.

6. Cucu Perempuan

- a. Satu perdua ($\frac{1}{2}$) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah.
- b. Dua pertiga ($\frac{2}{3}$) harta warisan apabila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah.
- c. Satu perenam ($\frac{1}{6}$) harta warisan untuk seorang atau lebih apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan guna menyempurnakan bagian $\frac{2}{3}$ harta warisan.
- d. Tertarik menjadi 'ashabah oleh cucu laki-laki (dari anak laki-laki) yang setingkat, dengan ketentuan cucu laki-laki menerima dua kali lipat bagian cucu perempuan. Cucu perempuan dapat tertarik menjadi 'ashabah oleh piyut laki-liku yang lebih bawah tingkatannya apabila tidak mendapat bagian karena terhalang waris lain.
- e. Terhalang (mahjub) oleh:
 - i) anak laki-laki
 - ii) dua orang atau lebih anak perempuan bila tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah.

7. Saudara Perempuan Kandung

QS An Nisa (4): 176 menentukan bagian saudara kandung sebagai berikut:

- a. Satu perdua ($1/2$) harta warisan apabila hanya seorang, tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.
- b. Dua pertiga ($2/3$) harta warisan, untuk dua orang atau lebih, apabila tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau ayah dan tidak ada yang menariknya menjadi ashabah.
- c. Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki kandung (atau oleh kakek), dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.
- d. Hadits Nabi memberikan ketentuan lagi yaitu sebagai ahli waris ashabah ma'al ghairi, untuk seorang atau lebih apabila bersama sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- e. Tertutup oleh ayah, anak laki-laki atau cucu (dari anak laki-laki).

8. Saudara Perempuan Seayah

Ketentuan QS. An Nisa (4): 176 berlaku pula terhadap saudara perempuan seayah, dalam hal tidak ada saudara kandung. Apabila ada saudara kandung, saudara seayah mempunyai ketentuan lain. Maka, ketentuan bagian saudara perempuan seayah adalah sebagai berikut:

keperluan-keperluan tersebut ditanggung oleh para ahli waris, terutama yang mampu.

Apabila dengan meninggalnya pewaris, tempat tinggal yang semula ditempati pewaris tidak ada yang menempati dalam arti anak-anak dan saudara-saudaranya sudah bertempat tinggal sendiri yang agak jauh, maka sering pula ahli waris (terutama anak) mengadakan selamatan sendiri-sendiri di rumah mereka sendiri-sendiri. Tentu saja segala biaya yang diperlukan ditanggung sendiri. Bukan menjadi beban harta yang ditinggalkan pewaris.

b. Pembayaran Hutang Pewaris

Jika semasa hidupnya pewaris masih mempunyai hutang yang belum dibayar, maka harta yang ditinggalkan pewaris, oleh para ahli waris digunakan untuk membayar dan melunasinya. Apabila harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak mencukupi, maka untuk menjaga nama baik keluarga besar pewaris, dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab, para ahli waris menambah semua kekurangan. Namun semua kekurangan tersebut tidak secara merata dibebankan kepada para ahli waris, tetapi dibagi menurut kemampuannya. Yang mampu atau kaya menanggung beban tanggung jawab yang lebih besar dari yang kurang mampu. Yang miskin mendapat bagian yang paling sedikit, atau bahkan tidak diikut

sertakan oleh ahli waris yang lebih mampu untuk itu pembayaran hutang pewaris.

Adanya kesadaran para ahli waris untuk melunasi hutang pewaris dengan harta kekayaannya sendiri tersebut dirasakan bukan sebagai beban yang diberikan oleh hukum, tetapi lebih dirasakan sebagai tanggung jawab anak kepada orang tua. Sebagai tanda berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkannya. Perbuatan demikian dianggap sebagai bagian dari pepatah yang mengatakan “Mikul duwur mendem jero” artinya menjunjung tinggi nama baik orang tua. Hal ini adalah wajar, sebab menurut hukum Islam ahli waris tidak berkewajiban membayar hutang pewaris dengan harta pribadinya.

Sebaliknya jika pewaris masih mempunyai hutang dan harta yang diinginkan tidak cukup untuk membayarnya sedangkan para ahli waris tidak membayarnya maka ahli waris tersebut harus menanggung beban moral yang berupa celaan dari masyarakat. Masyarakat akan mencela anak yang tidak mau membayar hutang yang dibuat oleh pewaris orang tuanya meskipun anak-anaknya sebagai ahli waris tidak termasuk orang yang mampu, oleh karena itu dengan cara apapun, walaupun para ahli orang-orang miskin tetap bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh orang tuanya yang telah meninggal dunia. Walaupun ahli waris tersebut harus mencari pinjaman kepada orang lain.

c. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat yang banyak dijumpai di Kecamatan Ajibarang adalah wasiat dari orang tua kepada anak-anaknya. Bentuk wasiat yang dilakukan memang hanya dilakukan secara lisan, tetapi mengenai sebagian besar atas harta benda yang pernah dimiliki oleh orang tua sebagai pewaris. Hal ini dapat terjadi karena adanya kebiasaan para orang tua di Ajibarang yang membagi harta pewaris yang membagi harta bendanya sewaktu masih hidup kepada semua anak-anaknya, sehingga kebanyakan hanya sebagian kecil saja dari harta pewaris yang tidak termasuk dalam perhitungan wasiat.

Sedangkan mengenai wasiat yang bukan kepada ahli waris utama, oleh karena masyarakat sangat menghormati kehendak terakhir dari seorang yang meninggal dunia maka para ahli waris secara ikhlas merelakanya. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh alam pemikiran masyarakat, bahwa harta benda orang yang telah meninggal dunia adalah “keramat” sehingga orang yang mengambil dan memakannya secara tidak sah tidak akan mendapatkan berkah. Akibatnya pelaksanaan pembayaran wasiat tidak banyak hambatan dari para ahli waris.

B. Pemisahan Harta Pewaris Dari Harta Bersama

Menurut hukum Islam yang dimaksud harta warisan adalah harta benda yang ditinggalkan pewaris, yang secara murni menjadi milik pewaris

sewaktu masih hidup. Oleh karena itu tidak semua harta yang ada dalam perkawinan dapat diwaris oleh para ahli waris. Selain harus dikurangi biaya pengkuburan jenazah, pembayaran hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat yang dibuat oleh pewaris, maka jika suami atau istri yang masih hidup mempunyai harta pribadi, baik yang berupa harta bawaan maupun harta asal, harus dipisahkan dari harta pewaris. Sebab harta bawaan dan harta asal suami atau istri yang masih hidup bukan harta pewaris, sehingga tidak termasuk harta benda yang dapat diwaris oleh ahli waris. Demikian halnya terhadap harta bersama didalam perkawinan. Harta ini harus dipisahkan dahulu antara harta yang menjadi milik pewaris dan harta yang menjadi milik suami-istri yang masih hidup.

Meskipun dalam sosial ekonomi budaya di Ajibarang hal ini sangat penting, mengingat kebanyakan para wanita yang mulai hidup berumah tangga mendapat bekal hidup untuk berkeluarga dari orang tuanya dan keikutsertaannya dalam menanggung kebutuhan ekonomi keluarga sangat menonjol, namun dalam hubungannya dengan pewarisan, jarang sekali ditemui adanya pemisahan harta warisan dari harta bawaan, harta asal atau harta bersama. Sebab jika suami atau istri meninggal dunia, biasanya tidak dilakukan pembagian warisan selama suami atau istri yang masih hidup tidak bersuami atau beristri lagi suami atau istri masih hidup biasanya menguasai harta benda tanpa harus membedakan harta asal atau bawaan atau harta bersama, untuk dipergunakan bagi kepentingan anak-anak maupun dirinya

sendiri. Jika anak-anaknya sudah berkeluarga semua, biasanya suami atau istri yang masih hidup membagi harta yang ada dalam keluarga tersebut, tanpa membedakan harta bawaan atau harta asal atau harta bersama, dengan wasiat.

Dengan demikian sebagian besar masyarakat Muslim di Ajibarang baru membagi harta warisan setelah suami istri meninggal dunia semua, sehingga praktis tidak ada pemisahan harta diantara suami istri jika salah satu meninggal dunia hal ini dilakukan agar dengan meninggalnya suami atau istri. Keutuhan dan kesatuan keluarga tetap nampak. Sebab jika suami atau istri meninggal dunia dan kemudian pembagian warisan dilakukan diantara suami atau istri dengan anak-anak dan sebagainya. Maka masyarakat akan menilai kurang baik. Yaitu masyarakat akan menilai bahwa dengan meninggalnya suami atau istri, keutuhan dan kesatuan keluarga menjadi retak. Kerukunan diantara anak-anak dengan suami atau istri yang masih hidup menjadi tidak ada lagi.

Namun hal itu bukan berarti semua masyarakat Muslim di Ajibarang melakukan hal yang sama. Jika dengan meninggalnya suami atau istri kemudian pembagian warisan harus dilakukan, maka harta bawaan dan harta asal kembali kepada suami atau istri yang mempunyainya. Harta ini bukan menjadi harta warisan, sehingga tidak ikut diwaris oleh para ahli waris. Kemudian tanpa memandang siapa yang mencari, suami atau istri, atau jika kedua-duanya mencari uang tanpa memandangi besar kecilnya penghasilan

masing-masing, harta yaang diperoleh selama perkawinan dibagi dua sama besar.

C. Saat Pembagian Warisan

Meskipun hukum Islam menentukan agar pembagian warisan segera dilaksanakan setelah penyelenggaraan penguburan jenazah, pembayaran hutang dan pelaksanaan wasiat agar harta yang ditinggalkan pewaris tidak bercampur dengan harta orang lain, namun kenyataan yang berlaku tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh masyarakat Muslim di Ajibarang hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal :

1. Adanya persepsi masyarakat bahwa harta warisan merupakan harta orang yang meninggal dunia, sehingga harta tersebut dianggap keramat, oleh karena itu walaupun ada ahli waris yang miskin dan sangat memerlukan uang, namun tidak mau menuntut agar harta warisan cepat dibagi.
2. Adanya persepsi bahwa pembagian warisan yang dilaksanakan segera setelah meninggalnya pewaris, berarti para ahli waris ingin cepat-cepat memiliki harta waris.
3. Adanya budaya masyarakat muslim dalam menyelenggarakan upacara selamatan atas meninggalnya pewaris, yaitu upacara 7 hari (Jawa : mitung dina) 40 hari (Jawa : matang puluh), 100 hari (Jawa : nyatus), 1 tahun (Jawa : mendak pisan), 2 tahun (Jawa : mendak pindo), dan 1000 hari (Jawa : nyewu).

Oleh karena itu masyarakat muslim di Ajibarang dalam membagi warisan biasanya dilakukan setelah 1000 hari dari kematian pewaris. Namun ada juga yang membagi warisan setelah 100 hari dari kematian pewaris, walaupun jumlahnya sedikit. Pada masyarakat muslim yang terkenal taat, pembagian harta warisan dilakukan setelah 40 hari dari kematian pewaris. Saat-saat pembagian harta waris tersebut dianggap tempat oleh yang melaksanakannya, karena sebelum saat-saat tersebut masih dianggap sebagai hari-hari berkabung.

D. Cara-Cara Yang Dilakukan Dalam Pembagian Warisan

Hukum Islam menentukan bahwa terbentuknya warisan adalah pada saat meninggalnya pewaris. Dengan demikian yang disebut pembagian warisan adalah pembagian harta yang ditinggalkan pewaris setelah digunakan untuk biaya penguburan jenazah, pembayaran hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat, oleh karena itu pemberian yang dilakukan oleh pewaris sewaktu masih hidup kepada para ahli waris. Menurut hukum Islam bukan termasuk pembagian warisan, prinsip ini tidak sepenuhnya dapat berlaku dikalangan masyarakat Muslim di Ajibarang mengingat kebiasaan para orang tua yang membagikan harta yang dipunyainya sebelum meninggal dunia, baik dalam bentuk wasiat maupun bukan.

Jika sebagian tersebut dalam bentuk wasiat, maka selang setelah 100 atau 1000 hari dari meninggalnya pewaris diadakan musyawarah tentang wasiat

yang telah dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia, jika para ahli waris dalam musyawarah tersebut telah menerima dan sepakat atas wasiat yang ditinggalkan pewaris. Maka wasiat dapat dilaksanakan, sebaliknya jika diantara para ahli waris ada yang tidak menerima wasiat, dalam arti menolak karena dianggap tidak adil, maka diselesaikan dengan musyawarah.

Sedangkan jika pembagian tersebut dalam bentuk pemberian nyata kepada para ahli waris, baik secara fisik maupun secara hukum, maka dalam jangka waktu 100 hari atau 1000 hari setelah meninggalnya pewaris, para ahli waris mengadakan musyawarah tentang sisa-sisa harta yang telah dibagikan sewaktu pewaris masih hidup, setelah dikurangi keperluan penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang atau wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada pihak ketiga yang bukan ahli waris.

Kebiasaan membagi harta dari para orang tua sewaktu masih hidup kepada anak-anaknya di Ajibarang, baik dalam bentuk pemberian nyata maupun wasiat, mempunyai beberapa alasan :

1. Karena orang tua sudah merasa keadaan lanjut usia, sehingga yang paling diperlukan baginya hanyalah perawatan kesehatan dan ketenangan pikiran. Kemauan untuk memiliki atau memproduksi atas harta yang dipunyai sudah tidak ada lagi.
2. Karena anak-anaknya sudah berumah tangga semua (Jawa = mencar), sehingga tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membiayai keperluan hidupnya menjadi lain. Oleh karena itu lebih dirasa tepat jika

harta yang ada dalam perkawinan dibagikan kepada anak-anak sehingga lebih banyak bermanfaat dari pada manfaat yang dapat diambilnya sendiri.

3. Untuk menjaga kerukunan dan mencegah perselisian yang mungkin timbul diantara para ahli waris, sebagai konsekuensi dari rasa hormat maka yang menjadi kebijaksanaan orang tua biasanya lebih ditaati, sehingga dengan membagi harta yang dipunyainya sebelum meninggal dunia, diharapkan tidak timbul perselisihan diantara para ahli waris. Apalagi ditunjang dengan kebiasaan yang dilakukan orang tua yang selalu mengumpulkan para ahli waris didalam pembagian tersebut, sehingga misalnya ada ahli waris yang tidak setuju dapat diselesaikan didalam pertemuan tersebut. Dengan demikian perselisian diantara para ahli waris jarang terajadi.

Meskipun demikian bukan berarti semua praktek pewarisan mengikuti tata cara tersebut. Terutama para orang tua yang pada waktu meninggal relatif belum berusia lanjut. Sebab anak-anaknya mungkin belum dewasa semua dan atau belum berkeluarga semua, sehingga masih memerlukan pengawasan, perawatan dan pemeliharaan, dalam keadaan demikian, maka orang tua tidak mungkin membagi harta kekayaan yang ada kepada anak-anaknya. Oleh karena itu dalam prakteknya jika salah satu orang tua ayah atau ibu meninggal dunia, maka harta yang ada dalam perkawinan tersebut dikuasai oleh suami atau istri yang masih hidup, untuk kepentingan dirinya sendiri dan anak-anaknya yang belum berkeluarga. Jika suami atau istri yang masih hidup tersebut kemudian meninggal, padahal

anak-anaknya ada yang belum dewasa dan belum pernah berumah tangga, maka anak yang tertua yang mengurus harta benda tersebut untuk kepentingan adik adiknya, sampai dewasa dan berkeluarga. Baru setelah semua dewasa dan berkeluarga, harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya tersebut dari ayah dan ibu, dibagi dengan musyawarah.

Pembagian warisan yang dilakukan dengan musyawarah demikian memang tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Sebab didalam hukum Islam dikenal adanya lembaga “Suluh” atau lebih dikenal “tasaluh” atau “takharuj” yang didalam komplikasi hukum Islam disebut dengan istilah “perdamaian”. Disebut didalam Psal 183 bahwa para ahli waris dapat bersepakat mengadakan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah masing-masing mengetahui haknya.

E. Ahli Waris Yang Berhak Dan Bagian Masing-Masing

Meskipun hukum kewarisan Islam menganut azas pemerataan, yaitu cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, namun sosio budaya ekonomi yang ada memberi kemungkinan lain dari apa yang menjadi ketentuan di dalam hukum Islam. Penyebab adanya kemungkinan lain tersebut pada prinsipnya berpangkal pada kebutuhan praktis, sesuai dengan situasi dan kondisi pewaris pada waktu masih hidup dan para ahli waris.

a. Suami atau Istri

Jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya yang sebagian atau semua belum dewasa, maka cenderung tidak diadakan pembagian warisan atas harta yang ditinggalkan pewais tersebut. Meskipun hal ini tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam, yang menekankan untuk tidak menunda-nunda pembagian harta warisan, agar harta warisan tidak bercampur dengan hak-hak orang lain, namun situasi dan kondisi yang didukung oleh sosial budaya yang menuntut para ahli waris bertindak praktis dan fungsi sosial, oleh karena itu selama tidak kawin lagi, istri menguasai harta yang ada dalam perkawinan untuk kepentingan anak-anak yang masih memerlukan bimbingan dan perawatan tindakan ini oleh masyarakat dianggap praktis dan fungsional. Namun harus didasari bahwa halitu hanya praktis dan fungsional bagi istri atau suami dan anak-anaknya. yaitu praktis bagi istri atau suami dalam mengurus harta warisan fungsional bagi kepentingan anak-anak, padahal harta warisan bukan hanya menjadi hak istri atau suami dan anak-anak. Orang tua jika ada misalnya, mempunyai kedudukan yang sama dengan istri atau suami dan anak-anak untuk memperoleh harta warisan. Oleh karena itu jalan keluar yang ditempuh dalam hal anak-anak pewaris masih kecil adalah dengan mengangkat wali bagi anak-anak yang belum dapat melaksanakan hak dan kewajibanya

tersebut. Demikian jalan keluar yang diberikan oleh komlikasi hukum Islam Pasal 184. Bukan dengan cara tidak membagi warisan.

Namun demikian hal tersebut bukan berarti bahwa istri tidak dianggap sebagai ahli waris, sebab jika ternyata istri kemudian kawin lagi, maka istri tersebut dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia. Bagiannya adalah sama dengan bagian anak.

Jika istri yang ditigalkan tersebut sudah tua, maka kebutuhan praktis yang diambil juga harus sesuai dengan situasi dan kondisi tersebut orang tua biasanya tidak banyak berhasrat atau membutuhkan lagi harta benda, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif kebutuhan yang paling penting hanyalah perawatan dan pemeliharaan kesehatan, sehingga istri tersebut tidak mendapat bagian warisan dalam bentuk seperti yang diterima anak-anaknya namun istri tetap berhak menikmati harta ada dalam keluarga tersebut yaitu dengan cara :

- a. Istri tersebut ikut salah satu anak tertentu dalam hal ini semua kebutuhan yang diperlukan menjadi tanggungan anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istri tersebut menikmati harta warisan melalui bagian warisan yang telah dibagikan kepada anak yang diikuti tersebut.
- b. Istri mungkin mendapat bagian harta tertentu, tetapi terbatas dalam menggunakan dan menikmatinya, sampai meninggal dunia. Sewaktu-

waktu istri tersebut meninggal, sudah ditentukan siap yang akan memiliki harta tersebut.

Hal tersebut yang diuraikan diatas berlaku juga bagi suami yang isterinya meninggal dunia. Dalam bentuk pembagian harta warisan yang bagaimanapun, suami atau istri dari pewaris tidak pernah terhalang untuk menikmati harta peninggalan suami atau istri yang telah meninggal dunia.

b. Anak Kandung

Anak merupakan generasi penerus yang sangat didambakan keberadaanya oleh para orang tua, oleh kerana itu anak baik pria maupun wanita di Ajibarang mendapat perlakuan yang istimewa. Namun perlakuan istimewa terhadap anak dalam masalah pewarisan di Ajibarang yang menempatkan anak sebagai ahli waris utama yang menghalangi orang tua pewaris untuk ^Mpewaris, merupakan bentuk perbuatan yang melampaui batas. Sebab menurut hukum Islam orang tua mempunyai kedudukan yang sama dengan anak sebagai ahli waris utama sehingga keberadaan anak tidak boleh menghalangi orang tua untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan anaknya. Dengan demikian menempatkan anak sebagai ahli waris utama yang menghalangi orang tua pewaris untuk mewaris. Dapat dipandang sebagai perilaku yang tidak menghormati orang tua, padahal orang tua telah melahirkan, membesarkan dan mendidiknya.

Perlakuan para orang tua muslim di Ajibarang terhadap anak-anaknya, yang tidak membedakan anak sulung, bungsu atau tengah dan tidak membedakan antara pria dan wanita, merupakan kenyataan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun perilaku yang sama dipraktekkan dalam pembagian warisan, yang memberikan bagian yang sama antar anak pria dan wanita merupakan penyimpangan terhadap hukum kewarisan Islam. Karena meskipun pembagian tersebut dilakukan dengan musyawarah, namun tindakan dapat digolongkan sebagai *tasaluh* atau perdamaian seperti yang ditentukan dalam kompilasi hukum Islam pasal 183. Sebab dalam musyawarah tersebut ternyata syarat utamanya tidak terpenuhi. Yaitu para ahli waris di dalam musyawarah tersebut tidak mengetahui tentang hak-haknya menurut hukum Islam.

c. Anak Angkat

Salah satu tujuan perkawinan antara lain untuk meneruskan keturunan. Oleh karena itu keturunan merupakan dambaan dalam kehidupan berkeluarga. Akibatnya suami dan istri yang tidak mempunyai anak dianggap sebagai keluarga yang belum berhasil.

Jika berbagai cara yang dilakukan dalam usahanya untuk melahirkan anak sudah tidak berhasil, maka berdasarkan nasehat para orang tua, suami istri tersebut mengambil anak orang lain dengan tujuan sebagai pancingan. Artinya pengambilan anak orang lain tersebut buka

menjadi tujuan akhir, tetapi sebagai saranan agar suami istri tersebut dapat melahirkan anak. Tentu saja anak yang diambil dan dipelihara tersebut masih bayi. Hanya selang beberapa hari atau bulan setelah dilahirkan, sehingga belum mengetahui orang tua kandungnya. Anak tersebut kemudian dirawat dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Harapan yang terkandung dengan memperlakukannya sebagai anak kandungnya adalah agar suami istri tersebut dapat melahirkan anak dari darah dagingnya sendiri.

Melalui proses yang panjang, keberadaan suami istri tersebut sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan anak yang dipelihara dan diangkatnya sejak bayi, sehingga meskipun dikemudian hari ternyata lahir anak kandungnya sendiri, namun eksistensi anak angkat tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga yang mengangkatnya oleh karena itu jika anak angkat baik angkat tersebut pria ataupun wanita tidak memperoleh bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, masyarakat menganggap sebagai hal yang ganjil. Oleh karena itu dalam pembagian warisan biasa dilakukan dengan cara musyawarah, maka bagian anak angkat yang secara pasti tidak dapat ditentukan.⁴⁸ Namun jika anak angkat mewaris bersama anak kandung, bagian anak kandung lebih besar dari bagian anak angkat. Jika pewaris tidak mempunyai anak kandung, dan yang ditinggalkan hanya anak angkat saja, maka anak angkat ini mewarisi semua harta pewaris. Dengan

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Ulama di Ajibarang Drs. H. Muhammad. Tanggal 23 - 4 - 2003

demikian anak angkat menutup ahli waris lain untuk memperoleh warisan terutama orang tua dan saudara dari pewaris.

Menempatkan anak angkat sebagai anak kandung di dalam masalah kewarisan secara demikian sebetulnya tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Sebab merugikan ahli waris yang berhubungan darah dengan pewaris.

Memang harus diakui bahwa memelihara anak orang lain untuk dijadikan anak angkat yang diperlakukan seperti anak kandung sendiri, merupakan perbuatan yang terpuji. Apa lagi anak yang diangkat tersebut adalah anak yatim atau anaknya orang fakir atau miskin. Namun menempatkan anak angkat sebagai ahli waris utama dari orang tua angkat seperti tersebut di atas, berarti telah keluar dari sistem yang diatur di dalam hukum kewarisan Islam. Apalagi ditempatkan sebagai ahli waris yang menghalangi orang tua dari pewaris untuk mewarisi.

Walapun demikian, bukan berarti bahwa anak angkat tidak diperbolehkan menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, sebab didalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat, jika ternyata tidak ada wasiat dari orang tua angkatnya, oleh karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat sudah sedemikian eratnya, dan keberadaan sudah menjadi bagian kehidupan keluarga, maka secara hukum anak angkat diberi wasiat

wajibah. Dengan ketentuan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat.

Sebaliknya jika ternyata anak angkat meninggal lebih dahulu dari orang tua angkatnya maka orang tua angkat dapat juga memperoleh harta warisan dari anak angkatnya dengan jalan wasiat. Demikian juga jika ternyata tidak ada wasiat dari anak angkatnya, maka orang tua secara hukum diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.

d. Orang Tua

Masyarakat sadar bahwa keberadaannya adalah karena adanya orang tua. Orang tua adalah melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkannya. Oleh karena itu hukum kewarisan Islam menempatkan orang tua sebagai ahli waris utama bersama-sama dengan anak dan suami atau istri dari pewaris, yang dalam keadaan yang bagaimanapun berhak memperoleh harta warisan.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat muslim di Ajibarang belum sepenuhnya mempraktekan norma hukum ini. sebab dalam praktek pembagian warisan ternyata orang tua, ayah atau ibu tertutup atau terhalang oleh anak pewaris, sehingga orang tua tidak mendapatkan harta warisan karena adanya anak. Jadi jika seseorang meninggal dunia dan meninggal istri, anak dan orang tua maka orang tua tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris tersebut.

Dipentingkannya anak dan istri dari pada orang tua, karena anak dan istri merupakan generasi penerus yang masih banyak langkah. Artinya jalan yang harus ditempuh masih panjang, sehingga kebutuhan serta kepentingan akan harta benda lebih terasa dari pada orang tua. Oleh karena itu pemberian warisan kepada anak dan istri dirasakan lebih bermanfaat. Orang tua biasanya sudah tidak banyak berhasrat lagi akan harta benda, sehingga yang sangat diperlukan hanyalah sekedar makan, minum dan perawatan kesehatan. Namun hal ini bukan berarti anak dan keturunan tidak berbakti kepada orang tua. Sebab dalam masalah berbakti kepada orang tua masih menjadi kebiasaan masyarakat bahwa orang tua menjadi satu dengan anak untuk dipelihara dan dirawat serta dicukupi segala kebutuhannya.

Dengan demikian orang tua hanya memperoleh warisan jika pewaris (anaknya) tidak meninggalkan istri dan keturunan, baik anak kandung maupun anak angkat. Jika pewaris ternyata tidak meninggalkan istri dan atau keturunan, maka orang tua menjadi ahli waris tunggal, yang memperoleh semua harta yang ditinggalkan pewaris.

e. Cucu

Meskipun hukum pewaris Islam menentukan bahwa keberadaan cucu tidak dapat menjadi penghalang bagi orang tua pewaris untuk mewaris, namun praktek yang dilakukan oleh masyarakat muslim

diAjjibarang didalam membagi warisan menunjukan lain. Keberadaan cucu sebagai penerus dari anak menjadi penghalang bagi orang tua pewaris untuk memperoleh harta warisan. Namun keberadaan tersebut dalam kedudukan sebagai pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Dengan demikian sesuai dengan prinsip didalam hukum kewarisan Islam, keberadaan cucu sebagai ahli waris tidak berdiri sendiri, tetapi bergantung dari keberadaan ayah atau ibunya. Artinya jika ayah atau ibunya dalam keadaannya sebagai ahli waris masih ada, maka cucu tertutup oleh ayah atau ibu untuk memperoleh harta warisan dari nenek atau kakak. Cucu baru dapat muncul sebagai ahli waris, jika ayah atau ibu sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Bagaimana warisan yang diterimanya adalah sama dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, yaitu bagian yang seharusnya diterima oleh ayah atau ibunya sebagai ahli waris.

Sesuai dengan prinsip nondiskriminasi didalam hukum kewarisan Islam, maka cucu yang berhak mewaris tersebut tidak dibedakan pria atau wanita, dari anak pria atau wanita. Oeh karena itu cucu pria maupun wanita dari anak pria atau wanita sama aja, mempunyai hak untuk ibunya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Praktek ini telah sesuai dengan prinsip penggantian ahli waris seperti yang ditentukan didalam komlikasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) dan (2).

f. Saudara

Hukum kewarisan Islam menentukan bahwa saudara dapat mewaris bersama-sama dengan orang tua dan suami atau istri dari pewaris. Saudara baru terhalang untuk mewaris jika pewaris mempunyai keturunan, baik anak maupun cucu. Namun demikian ketentuan ini belum dapat berlaku sepenuhnya bagi masyarakat Ajibarang dalam membagi harta warisan. Dapat dikatakan demikian karena di Ajibarang, saudara baru dapat muncul sebagai ahli waris yang dapat memperoleh harta warisan yang ditinggalkan pewaris jika ;

- a. Pewaris tidak meninggalkan keturunan, baik anak maupun cucu dan seterusnya ke bawah, pria maupun wanita anak kandung maupun anak angkat. Dengan demikian anak angkat menjadi penghalang bagi saudara untuk mendapatkan warisan.
- b. Pewaris tidak meninggal suami atau istri.
- c. Pewaris tidak meninggalkan orang tua, baik ayah atau ibu.

Sesuai dengan prinsip persamaan antara pria dan wanita, maka saudara tidak dibedakan pria maupun wanita, semuanya mempunyai hak waris.

III. ANALISA PENGARUH WANITA DALAM MENANGGUNG BEBAN EKONOMI KELUARGA TERHADAP WARISAN YANG DITERIMANYA

Dalam menguji korelasi (*corelate*) mengenai pengaruh Peranan Wanita Dalam Menanggung Beban Ekonomi sebagai variabel x, terhadap pembagian warisan sebagai variabel y, dipakai teori statistik berdasarkan rumus korelasi product moment yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[N \sum x^2 - (\sum x)^2][N \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Di mana :

- r_{xy} : Koefisien korelasi r
- X : Skore dalam distribusi variabel x
- Y : Skore dalam distribusi variabel y
- N : Banyaknya pasangan sekore x dan skore y

Hasil penelitian yang berupa data kasar menunjukkan bahwa wanita yang tidak berperan menanggung beban ekonomi keluarga, yang memperoleh warisan setengah bagian yang diterima pria sebanyak 8% dan yang memperoleh bagian sama dengan pria sebanyak 22%. Wanita yang berperan menanggung beban ekonomi keluarga dalam kriteria kecil, yang memperoleh warisan setengah bagian yang diterima pria sebanyak 2%, dan yang

memperoleh bagian sama dengan pria sebanyak 12%. Wanita yang berperan menanggung beban ekonomi keluarga dalam kriteria sedang, yang memperoleh warisan setengah bagian yang diterima pria sebanyak 4% dan yang memperoleh bagian sama dengan pria sebanyak 18%. Wanita yang berperan dalam menanggung beban ekonomi keluarga dalam kriteria besar, yang memperoleh warisan setengah bagian yang diterima pria sebanyak 8%, dan yang memperoleh bagian sama dengan pria sebanyak 6%, sedangkan wanita yang berperan menanggung beban ekonomi keluarga dalam kriteria sangat besar, yang memperoleh bagian warisan setengah bagian yang diterima pria sebanyak 8% dan yang memperoleh bagian yang sama dengan pria sebanyak 12%.

Untuk mempermudah pengujian ada atau tidak adanya Pengaruh Peranan wanita dalam menanggung beban ekonomi keluarga terhadap pembagian warisan. Dari data hasil penelitian disusunlah matriks sebagai berikut:

TABEL INDUK

$\begin{matrix} y \\ x \end{matrix}$	1	2	3	4	fi
1	0	8	22	0	30
2	0	2	12	0	14
3	0	4	18	0	22
4	0	8	6	0	14
5	0	8	12	0	20
Fa	0	30	70	0	N = 100

X = Peranan Wanita dalam Menanggung Beban Ekonomi

1 = Tidak mempunyai peranan dalam menanggung ekonomi

2 = Berperan dalam menanggung beban ekonomi dalam kriteria kecil

3 = Berperan dalam menanggung beban ekonomi dalam kriteria sedang

4 = Berperan dalam menanggung beban ekonomi dalam kriteria besar

5 = Berperan dalam menanggung beban ekonomi dalam kriteria sangat besar

y = Bagian warisan yang diterima

1 = Kurang dari setengah bagian yang diterima pria

2 = setengah bagian yang diterima pria

3 = sama dengan bagian yang diterima pria

4 = Lebih besar dari yang diterima pria

Dari hasil uji statistik ini dapat disimpulkan bahwa hasilnya negatif, artinya pengaruh peranan wanita dalam menanggung beban ekonomi keluarga terhadap penerimaan warisan sangat lemah.

Dengan demikian perolehan bagian warisan wanita tidak banyak dipengaruhi oleh keikutsertaan para wanita dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Ikut serta atau tidaknya para wanita bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga tidak banyak pengaruhnya terhadap jumlah warisan yang diterimanya. Besar kecilnya bagian warisan yang diterima para wanita tidak banyak dipengaruhi oleh ikut serta atau tidaknya dalam membantu suami mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan demikian uji statistik untuk mengetahui apakah semakin besar peranan ekonomi yang dilakukan wanita semakin besar pula harta warisan yang diterimanya, atau sebaliknya, apakah semakin kecil peranan ekonomi yang dilakukan wanita semakin kecil pula harta warisan yang diterimanya, tidak dapat dilakukan. Sebab hasil uji statistik tentang pengaruh peranan wanita didalam keluarga manunjukkan negatif, artinya pengaruh tersebut sangat lemah, dapat dikatakan hampir tidak ada pengaruh.

IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESAR KECILNYA PEROLEHAN BAGIAN WARISAN YANG DI TERIMA OLEH AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN DI KECAMATAN AJIBARANG

Hampir semua proses pembagian harta warisan di Ajibarang dilakukan dengan cara musyawarah. Oleh karena kesepakatan para ahli waris merupakan satu satunya pedoman untuk dapat dilaksanakan dan tidaknya pembagian warisan. Proses ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesatuan dan kerukunan para ahli waris. Dengan demikian jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, bukan menjadi satu-satunya pedoman yang harus dilaksanakan dalam pembagian warisan. Oleh karena itu bagian warisan yang diterima masing-masing sesama anak saebagai ahli waris berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, meskipun tidak dominan perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor sebagai berikut : ⁴⁹

1. Faktor Jenis Kelamin

Faktor jenis kelamin yang memperngaruhi besar kecilnya perolehan warisan sesama ahli waris disini ternyata tidak mandiri. Artinya ada pengaruh lain yang mengakibatkan perbedaan perolehan yang diterima oleh sesama ahli waris. Yaitu adanya persepsi yang menjadi kenyataan hukum bahwa pria secara hukum bertanggung jawab menanggung beban ekonomi keluarga, ketaatan terhadap hukum kewarisan Islam dan ketaatan kepada hukum adat yang mengajarkan adanya prinsip

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ulama di Ajibarang . H. Chudari dan Kepala Desa Pancurendang Drs. Dedi Setiadi, Camat Ajibarang yaitu W. Purwandono, SH, tanggal 30 – 4 – 2003

Segendong Sepikul. Oleh karena itu sebagai ahli waris, khususnya anak sebagai ahli waris, memperoleh warisan setengah bagian yang diterima anak pria.

2. Faktor Kelahiran

Faktor ini berpegang pada rasa kebanggaan dan tanggung jawab anak tentu kepada anggota keluarga. Hal ini terjadi karena sebagai masyarakat menganggap proses pewarisan dapat berlangsung sebelum pewaris meninggal dunia, sehingga pemberian dari pewaris sewaktu masih hidup diperhitungkan dan dianggap sebagai warisan, oleh karena itu dapat terjadi perolehan warisan anak sulung lebih besar dari anak yang lain. Perolehan anak sulung lebih besar dari anak lainnya tersebut biasanya disebabkan oleh adanya tanggung jawab dalam membantu kebutuhan adik-adiknya, sedang perolehan anak bungsu yang lebih besar dari anak lain biasanya disebabkan oleh adanya kasih sayang yang lebih dan tanggung jawabnya dalam memelihara dan merawat orang tuanya yang menjadi pewaris.

3. Faktor Kehidupan Ekonomi

Meskipun kehidupan ekonomi dalam suatu keluarga lebih banyak ditentukan oleh hasil usaha kerja dari keluarga yang bersangkutan namun oleh karena kemampuan manusia hanya terbatas dalam usaha sedangkan yang menentukan adalah Allah SWT, maka tidak setiap keluarga dari para ahli waris mempunyai kehidupan ekonomi yang sama, ada yang

lebih mampu dan ada yang kurang mampu bahkan mungkin ada yang miskin. Mengingat hampir semua pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah maka ada kemungkinan sesama anak dalam kedudukannya sebagai ahli waris memperoleh bagian warisan yang berbeda berdasarkan tingkat kehidupan ekonomi keluarga. Artinya ada kemungkinan anak yang kurang mampu dibandingkan dengan yang lain memperoleh bagian warisan yang lebih banyak dari yang diterima anak lebih mampu.

4. Hubungan Personal antara Pewaris dan Ahli Waris

Meskipun menurut ajaran Islam, membedakan sesama anak tidak dibenarkan namun dalam kenyataan kadang-kadang hal tersebut tidak dapat dihindarkan. Hal ini dimungkinkan disebabkan karena adanya anak yang penurut, ada anak yang nakal dan sebagainya. Keadaan ini kadang-kadang menimbulkan adanya kenyataan bahwa orang tua lebih menyayangi anak yang satu dari pada yang lain. Oleh karena hampir semua praktek pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah dan proses pewarisan tidak hanya dimulai pada saat meninggalnya pewaris, maka perlakuan orang tua yang lebih mengasihi dan menyayangi anak yang satu dari yang lain tersebut sampai pada masalah pembagian warisan. Akibatnya anak yang lebih dikasihi dan disayangi tersebut mendapat bagian warisan yang lebih dari pada bagian yang diterima anak yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan wanita dalam keluarga di Kecamatan Ajibarang adalah :
 - a. Wanita sebagai istri . sebagai istri yang baik dalam masyarakat Jawa di gambarkan sebagai berikut : istri harus cakap, tidak sombong, taat pada suami, setia, cermat, tanggap, bersahabat, siap, tulus, susila, membuat suami senang, trampil, cekatan, penurut, berbakti pada orang tua/mertua, hati-hati, terus terang, mampu mengendalikan diri, merawat diri, menyimpan rahasia, hemat. Peranan ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
 - b. Wanita sebagai ibu, sebagai ibu dari anak-anak yang dikandungnya ia berperan melahirkan, menyusui, merawat dan mendidiknya.
 - c. Keikutsertaan para wanita ibu rumah tangga bekerja bukan untuk menyaingi suami, tetapi justru membantu suami dalam menjalankan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Keikutsertaan memenuhi kebutuhan ekonomi ini oleh para wanita ibu rumah tangga tidak dirasakan sebagai beban, tetapi lebih dirasakan sebagai kebutuhan dalam rangka gotong-royong suami istri. Oleh

karenanya suami dalam taraf tertentu juga ikut membantu istri dalam melakukan fungsi primernya sebagai ibu rumah tangga.

- d. Meskipun keikutsertaan wanita bekerja fungsional bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, namun oleh karena potensi kodrati wanita tidak mungkin melakukan fungsi ekonomi dan fungsi ibu rumah tangga secara bersama-sama dalam waktu yang sama, maka istri menjadi disfungsional dalam menjalankan peranannya sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus jalannya kehidupan keluarga. Untuk mengatasi disfungsionalnya istri sebagai ibu rumah tangga ini, maka cara yang dilakukan adalah memberikan sebagian tugas istri sebagai rumah tangga kepada pembantu.
 - e. Walaupun keikutsertaan istri menanggung beban ekonomi keluarga dalam taraf tertentu mengurangi rasa ketergantungan istri kepada suami, namun tidak menjadi suami kehilangan eksistensinya sebagai kepala rumah tangga.
2. a. Pengaruh Peranan wanita sebagai istri yang ikut menanggung memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bervariasi. Ada yang lebih besar dari suami, ada yang sama dengan suami, ada yang setengah dari suami ada yang kurang dari seperempat penghasilan suami.
 - b. Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Ajibarang bervariasi sesuai dengan kemasalahatan yang dianggap

perlu. Bagi para orang tua yang sudah berusia senja, biasanya membagikan harta yang dipunyainya sewaktu masih hidup, baik dengan wasiat maupun pemberian nyata. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dengan meninggalnya pewaris, tidak terjadi perselisihan diantara ahli waris. Jika sewaktu hidupnya pewaris belum membagikan harta yang dipunyainya, baik dengan wasiat maupun dengan pemberian nyata, maka pembagian warisan yang dilakukan diantara para ahli waris juga dilakukan berdasarkan musyawarah. Semua itu dilakukan untuk menjaga kerukunan diantara para ahli waris.

- c. Sebagian besar wanita muslim di Ajibarang memperoleh warisan sama dengan bagian pria (70%) sedangkan selebihnya memperoleh warisan setengah bagian yang diterima pria, wanita tidak ada yang memperoleh bagian warisan yang melebihi bagian pria.
- d. Peranan wanita didalam keluarga tidak banyak pengaruhnya terhadap bagian warisan yang diterimanya. Artinya, besar kecilnya warisan yang diterima wanita tidak banyak dipengaruhi oleh ikut serta atau tidaknya dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya dalam praktek pembagian warisan, perolehan bagian warisan wanita yang ikut bekerja membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak jauh berbeda dengan wanita yang hanya sebagai ibu rumah tangga saja.

- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan bagian warisan diantara para ahli waris diantaranya, faktor jenis kelamin, faktor kelahiran, faktor kehidupan ekonomi, dan faktor hubungan personal antara ahli waris dan pewaris sewaktu masih hidup. Namun faktor ini lebih bersifat kasuistis insidental.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran yang perlu diajukan sebagai berikut:

1. Oleh karena hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari satu sistem ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka di dalam ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian dan khotbah-khotbah, sangat penting dijelaskan mengenai arti pentingnya hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim. Bahwa menjalankan hukum kewarisan Islam merupakan ibadah.
2. Oleh karena di dalam pembagian warisan selalu dilakukan dengan musyawarah, maka jika bagian warisan wanita tidak setengah dari pada pria atau disamakan dengan pria, terlebih dahulu harus dijelaskan didalam musyawarah tersebut, bahwa menurut hukum kewarisan Islam bagian warisan wanita adalah setengah dari bagian pria. Hal ini sangat penting agar praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim tidak merupakan bentuk pengingkaran terhadap hukum Allah.

3. Walaupun kenyataan yang didukung oleh budaya yang ada menunjukkan bahwa orang tua pewaris tidak banyak membutuhkan materi lagi, karena kebutuhannya sudah ditanggung anak-anak, maka agar praktek pembagian warisan yang tidak memberikan hak kepada orang tua pewaris bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap eksistensi hukum Islam. Orang tua pewaris tersebut harus diajak musyawarah dan diberitahu bagiannya atas harta warisan yang ditinggalkan anaknya. Sebab jika orang tua pewaris tidak diberi hak, tidak diajak musyawarah, dan tidak diberitahu haknya atas harta warisan yang ditinggalkan anaknya, dan harta warisan hanya dibagi antara suami atau istri dan anak-anak, maka istri atau suami dan anak-anak tersebut berarti memakan hak orang lain. Padahal memakan hak orang lain adalah haram. Apalagi hak orang tua pewaris yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan mendidik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, H Sulaiman, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya

Al'Asqalani, Ibnu Hajar, Bulughul Maram, Surabaya, Sualaiman Mar'it, 1981

Ali, Mohammad. M, Tahir Ashary dan Habibab Daud, Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik, Jakarta, Bulan bintang, 1989

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang, Asy-Syira, 1998

Ash-Shiddieqy, T.M Hasbi, Fighul Mewaris, Jakarta, Bulan Bintang, 1973

Basyir, A. Azhar, Hukum Waris Islam, Yogyakarta, UI Press, 2001

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogya, UI, 1989

Beberapa Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Undang-undang Perkawinan Departemen Kehakiman, 1985

Budiono, A Rahmad, Pembaharuan Hukum kewarisan Islam di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999

Djamali, R. Abdul, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorium Ilmu Hukum, Bandung, CV Mandar Maju, 2002

Fyzee, Asaf, Pokok-Pokok Hukum Islam Dua, Jakarta, Tinta Emas, 1965

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Gaotot Murniatmo Ed dan RM Soedarsono, Nilai Anak dan Wanita dan Wanita dalam Masyarakat Jawa, Jakarta Depdikbud, 1986
- Haar, Ter, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta, Pradanya Paramita, 1930
- Hasan Hasniah, Hukum Warisan Dalam Islam, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987
- Hasan, Ali, Hukum Waris Dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1981
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta Tinta Mas, 1982.
- , Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist Jakarta, Tinta Mas, 1982.
- Katalog BPS, Kecamatan Ajibarang Dalam Angka 2001
- Khudari, A Kami, Al Mawaris Al Islamiyah, Kairo, Al Majlisul Al'lailisy-Syu'unil Islamy, 1966
- Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, 2000
- Muchlas Imam, Waris Mewarisi Dalam Islam (Suatu Study Kasus) PT Garoeda Buana Indah
- Muhammad bin 'Ali Asy-Syakani, Ad -Durarul Mudiyyah, Kairo, Darul 'Usur Lit Tab'I wan Nasyr, 134 h
- Musa, Yusuf, At-Tirkat Wal Miras Fil Islam, Kairo, Darul Ma'rifan, 1967

- Parman Ali, Kewarisan Dalam Islam Al-Qur'an Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Projodikoro, R Wirjono, Hukum Warisan di Indonesisa, Bandung, Sumur Bandung, 1993.
- Rachmat, Jalaludin, Islam Alternatif, Bandung, Mizar, 1986.
- Sabiq, As Sayid, Fighus Sunnah, Bairut, Darul Kitabil Arabi, 1971
- Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial Dasar-dasar dan Aplikasir, Jakarta, CV Rajawali, 1992.
- Sangarimbun Masri, Metode Penelitian Survey, Jakarta, LP3ES. 1982.
- Sihombing, Herman, Pengaruh Hukum Perkawinan Terhadap Hukum Waris, Jakarta, Depkeh, 1989
- Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986
- , Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta, PT Raja Grafindo Persadan, 1995
- , Soerjono, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991
- Soemitro, R. Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1985

- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Yogyakarta, Liberty, 1997
- Suggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Administratif, Bandung, Alfabeta, 2001
- Syahatah Husein, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Jakarta, Gema Insani Press, 1998
- Syarifudin, Amir, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Jakarta, Gunung Agung, 1984
- Thalib, Sajuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Jakarta, UI PRESS, 1982.
- Wiratmo Soekito, S. Widoyati, anak dan Wanita Dalam Hukum, LP3ES, 1989
- Yaljan. Miqdad, Potret Rumah Tangga Islamy (Al-Bitul Islami) Terjemahan SA Zemol, Solo, Pustaka Manti, 1987
- Yunus, Mahmud, Hukum Warisan Dalam Islam, Jakarta, Pustaka Mahmudiyah, 1974
- Zahra, Abu, At-Tirkat Wal Maris, Kairo, Darul Fikrik, 'Arabi, 1963

**PENGARUH PERANAN WANITA DALAM KELUARGA
TERHADAP PENERIMAAN HARTA WARISAN
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS)**

1. Identitas responden
 - a. Nama
 - b. Alamat..... desa
 - c. Kedudukan responden dalam keluarga sebagai :
 1. Kepala keluarga (suami)
 2. Ibu rumah tangga (istri)
2. Apakah anda hanya sebagai ibu rumah tangga saja?
 - a. ya
 - b. tidak
3. Apakah sebagai ibu rumah tangga anda mempunyai pekerjaan?
 - a. ya
 - b. tidak
4. Apakah anda bekerja sebagai :
 1. PNS
 2. Pedagang
 3. Wiraswasta
 4. Lain-lain

5. Bila anda bekerja apakah penghasilan yang anda dapatkan?
 - a. Kurang lebih seperempat atau kurang dari penghasilan suami
 - b. Kurang lebih setengah dari penghasilan suami
 - c. Sama dengan penghasilan suami
 - d. Melebihi penghasilan suami

6. Bila anda bekerja berapa bagian warisan yang anda terima dari orang tua dibanding saudara laki-laki anda?
 - a. Kurang dari setengah bagian yang diterima saudara laki-laki
 - b. Setengah bagian yang diterima saudara laki-laki
 - c. Sama dengan bagian yang diterima saudara laki-laki.
 - d. Lebih besar dari bagian yang diterima saudara laki-laki.

7. Bila anda tidak bekerja berapa bagian warisan yang anda terima dari orang tua dibanding saudara laki-laki?
 - a. Kurang dari setengah bagian yang diterima saudara laki-laki
 - b. Setengah bagian yang diterima saudara laki-laki
 - c. Sama dengan bagian yang diterima saudara laki-laki.
 - d. Lebih besar dari bagian yang diterima saudara laki-laki.

8. Lebih memilih mana apabila anda bekerja?
 - a. Di dalam rumah
 - b. Di luar rumah

9. Apakah anda bekerja ini mendapat ijin dari suami atau tidak?
 - a. mendapat ijin
 - b. tanpa ijin

10. Keikutsertaan anda bekerja karena apa?

- a. Sukarela
- b. Terpaksa
- c. Kebutuhan

Wawancara dilakukan pada :

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Oleh :